

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) adalah perkembangan dari pelaksanaan kegiatan perekonomian yang menjadikan barang dan jasa yang diproduksi di masyarakat bertambah dan meningkatkan kemakmuran masyarakat (Pujoalwanto, 2014). Masalah yang timbul dari pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai suatu masalah ekonomi makro dalam jangka panjang. Perkembangan dari kemampuan memproduksi barang dan jasa dijadikan sebagai akibat dari bertambahnya faktor-faktor produksi dan pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan dari produksi barang dan jasa yang besarnya sama (Espada, 2015).

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kenaikan jangka panjang dengan kemampuan yang dimiliki suatu negara dalam menyediakan jenis barang-barang ekonomi yang semakin bertambah banyak dan ditujukan kepada penduduknya. Kemajuan teknologi juga pemicu semakin bertumbuhnya kemampuan ini serta penyesuaian baik dalam kelembagaan maupun ideologis yang dibutuhkan. Adapun ciri-ciri pertumbuhan ekonomi dalam (Rapanna & Sukarno, 2017) adalah:

1. Laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita;
2. Peningkatan produktivitas;
3. Laju perubahan struktural yang tinggi;

4. Urbanisasi;
5. Ekspansi negara maju;
6. Arus barang, modal dan antarbangsa.

Pertumbuhan ekonomi dikatakan merata mencakup tiga aspek penting dalam mengutamakan pelayanan menurut (Renyowijoyo, 2010), yaitu:

1. Masukan (*Input*) merupakan sumber daya yang digunakan untuk kegiatan pelaksanaan suatu kebijakan, program dan aktivitas.
2. Keluaran (*Output*) merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas dan kebijakan.
3. Pencapaian Hasil (*Outcome*) merupakan hasil dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu.

Pertambahan potensi biasanya memproduksi lebih besar daripada pertambahan produksi yang sesungguhnya. Dengan begitu perkembangan ekonomi disimpulkan lebih lambat dari potensinya (Sukirno, 2011). Pertumbuhan ekonomi memiliki beberapa teori diantaranya adalah (Sukirno, 2011):

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan para ahli-ahli ekonomi Klasik, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stock barang-barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa dalam pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi Klasik terutama menitikberatkan perhatian pada pengaruh pertumbuhan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi.

2. Teori Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi, memperkenalkan barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang, memperluas pasar suatu barang ke pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi ini akan memerlukan investasi baru.

3. Teori Harrod-Donar

Teori Harrod-Donar dalam analisisnya bertujuan menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady growth* dalam jangka panjang. Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut.

4. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Abramovitas dan Solow dalam teori pertumbuhan Neo Klasik mengemukakan bahwa faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan pertambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan tenaga kerja.

Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balasan jasa riil terhadap pembangunan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai syarat dalam pembangunan. Faktor non ekonomi seperti faktor sosial dan politik (Harjanto, 2011).

Dua hal essential harus dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah, sumber-sumber menganggur dan alokasi penggunaannya kurang efisien, penawaran atau jumlah sumber-sumber atau elemen-elemen pertumbuhan ekonomi (Harjanto, 2011) adalah sebagai berikut:

1. Sumber-sumber Alam, elemen yang meliputi luasnya tanah, sumber mineral dan tambang iklim, dan lain-lain.
2. Masalah dibanding sumber daya manusia dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya ialah terlalu banyak jumlah penduduk, penggunaannya rendah, dan kualitas sumber-sumber daya tenaga kerja sangat rendah.
3. Kualitas kerja rendah, negara-negara berkembang tak mampu mengadakan investasi yang memadai untuk kenaikan kualitas sumber daya manusia berupa pengeluaran untuk memelihara kesehatan masyarakat serta untuk pendidikan latihan kerja.
4. Akumulasi Kapital, untuk mengadakan akumulasi kapital diperlukan pengorbanan atau penyesihan konsumsi sekarang selama beberapa dekade. Di negara yang sedang berkembang, tingkat pendapatan rendah pada tingkat batas hidup sehingga mengakibatkan tersisihnya usaha. Usaha-

usaha untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memusatkan pada akumulasi pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memusatkan pada akumulasi kapital.

2.1.2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum atau yang biasa disingkat DAU adalah suatu bagian dari dana perimbangan yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam mengatur keuangan dan mendanai sesuai dengan kebutuhan daerah guna untuk mewujudkan Desentralisasi (Putra, 2018). Dana alokasi umum sebagai salah satu elemen desentralisasi fiskal menjadi elemen penting bagi pemerintah daerah untuk menutup pembiayaan daerah implikasinya, dana alokasi umum dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dana alokasi umum yang merupakan transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bersifat “*block grant*”, yang berarti daerah diberi keleluasan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antardaerah (Kurniawan, 2018).

Desentralisasi fiskal melalui instrumen utaman dana alokasi umum atau dana alokasi umum dalam pemberlakuan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah berhasil memberikan kontribusi bagi daerah untuk menekan ketimpangan di Indonesia. Pertanyaan inilah yang menjadi titik berat yang harus dikaji lebih dalam, mengingat masih besarnya disparitas antardaerah di

Indonesia. Ketidakmerataan memang tidak terlepas dari disparitas antardaerah di Indonesia terutama dalam hal penguasaan sumber daya alam atau sumber penerimaan antardaerah satu dan daerah lainnya, selain juga perkembangan industri setempat. Dalam porsi kecil yang diterima daerah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di daerah-daerah tersebut, karena sebagian besar hasil eksplorasi sumber daya lebih banyak di pusat dibanding di daerah.

Landasan hukum dana alokasi umum pelaksanaan adalah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah. Sebagai amanat UU No.33 Tahun 2004, alokasi yang dibagikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat minimal 26 persen dari total penerimaan dalam negeri netto. Dengan adanya ketentuan itu maka bergantung pada kondisi APBN dan Fiscal Sustainability pemerintah Indonesia, alokasi dana alokasi umum dapat lebih besar dari 26 persen dari total pendapatan dalam negeri netto. DAU diberikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, kebutuhan daerah dihitung berdasarkan variabel-variabel yang ditetapkan undang-undang, sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas penerimaan asli daerah dan dana bagi hasil yang diterima daerah. Sementara alokasi dasar dihitung berdasarkan gaji PNS daerah.

Ketetapan mengenai dana alokasi umum sekurang-kurangnya 26 persen dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas

dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Alokasi dasar sebagaimana mestinya dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota (Putra, 2018).

2.1.3. Belanja Modal

Belanja diklasifikasikan berdasarkan kelompok belanja menjadi dua, yaitu: belanja Tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan setiap satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dan kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap dan/atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlukan secara periodik (Zamzami, Mukhlis, & Pramesti, 2018). Yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tak terduga.

- 1) Belanja pegawai, ialah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan kesatuan perundang-undangan.
- 2) Belanja bunga, biasanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perajjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- 3) Belanja subsidi, digunakan untuk menggambarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat agar jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- 4) Belanja hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang dan jasa kepada pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- 5) Bantuan sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Belanja bagi hasil, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan teknis kepada kabupaten/kota kepada pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 7) Belanja tidak terduga, untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengambilan dan kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja langsung adalah belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program kegiatan. Yang termasuk dalam belanja langsung adalah: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

1. Belanja pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
2. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran dan pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah.
3. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari suatu periode, termasuk didalamnya ada pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan masa manfaat dan meningkatkan kualitas aset.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pengembangan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti, dalam bentuk tanah, perlatan dan mesin gudang dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian (Rosminar, Khaddafi, & Syamni, 2017).

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada pemerintah beberapa daerah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nagari, 2017) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2013. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknis analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) adalah model regresi data panel yang paling tepat. Berdasarkan uji t, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan uji F, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Muda & Ridha, 2018) dengan judul Pengaruh Pendapatan dan Dana Alokasi Umum Pengeluaran Modal dalam Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderator (Kasus Indonesia). Model

analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square dilakukan dengan bantuan program komputer EViews versi 7.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen, yaitu Pendapatan Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal tetapi pendapatan daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya mampu memoderasi (memperkuat / melemahkan) hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Pemerintah Belanja Modal Kabupaten / Kota di provinsi Sumatera Utara dan provinsi Aceh pada 2012-2015.

Penelitian yang dilakukan (Pattawe, Nurdin, Haris, & Bakri, 2017) Pengaruh Pendapatan Lokal dan Hibah Padanan terhadap Modal Pendapatan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Modal. Ini menunjukkan Pendapatan Lokal itu (2011-2015) telah digunakan secara tepat untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana secara berurutan untuk memberikan layanan kepada publik dengan meningkatkan porsi Pengeluaran Modal. Matching Grant memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Modal. Ini menunjukkan Pencocokan itu Hibah (2011-2015) telah digunakan secara tepat untuk meningkatkan bagian Pengeluaran Modal. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Ini menunjukkan itu optimalisasi penarikan pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah memiliki efek positif pada Pertumbuhan Ekonomi.

Matching Grant memiliki efek positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyorini, 2018) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kota Atau Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur. Teknik Pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampel yang kemudian didapatkan 36 sampel perusahaan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan hasil uji F atau secara simultan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, 2015) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Yogyakarta Periode Tahun 2007-2013. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik sampling jenuh dimana seluruh populasi akan dijadikan sampel penelitian. Metode untuk menganalisis datanya digunakan metode analisis regresi linier berganda. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus

berpengaruh secara parsial terhadap anggaran belanja modal. Sedangkan Dana Bagi hasil tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fajrina & Suzan, 2015) tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Belanja modal (Studi kasus pada pemerintah daerah Kota Bogor tahun Anggaran 2009-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal sebesar 98 persen dan secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan secara negatif terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rosminar et al., 2017) tentang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal daerah kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sumber-sumber keuangan sendiri, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, pengeluaran daerah yang lebih tinggi dari pemerintah kabupaten/kota. Temuan-temuan mengidentifikasi bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan alokasi umum, dan

dana alokasi khusus adalah hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Widiasih, 2017) tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan dana bagi hasil berpengaruh negatif terhadap belanja modal, dan fenomena *flypaper effect* tidak terjadi dalam belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pramesti & Taufik, 2015) tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap anggaran Belanja Modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi diprosikan oleh PDRB harga konstan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2016) tentang pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dan kemandirian keuangan daerah provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, pendapatan asli daerah berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal yang artinya bahwa pendapatan asli daerah belum memiliki peran penting dalam alokasi belanja modal, dana alokasi umum mempunyai pengaruh signifikan dan

negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan.

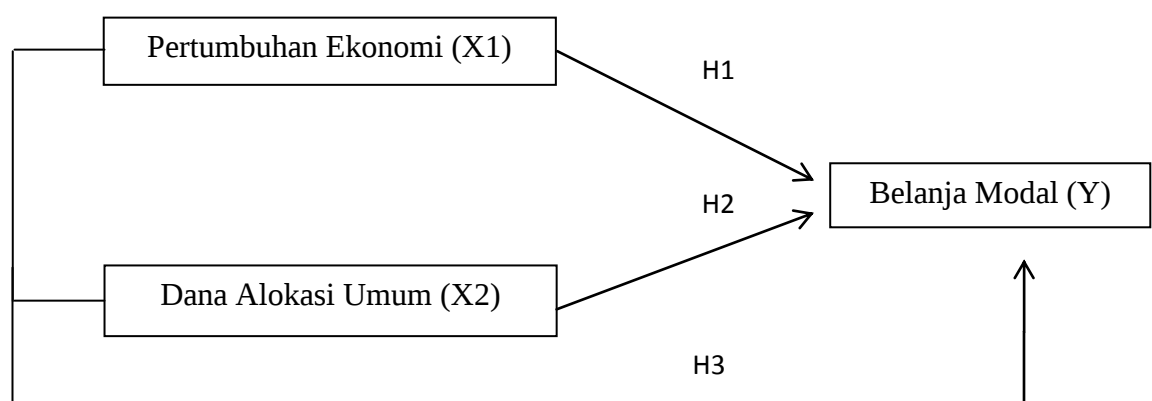
2.3. Kerangka Pemikiran

2.3.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan biasanya disebabkan oleh jumlah produksi barang dan jasa di masyarakat bertambah sesuai kebutuhan. Sehingga jika nilai pertumbuhan ekonomi meningkat akan meningkatkan belanja modal, atau sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi menurun maka belanja modal juga akan menurun mengikuti pengeluaran yang dikeluarkan sesuai kebutuhan masyarakat.

2.3.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dana alokasi umum memiliki pengaruh yang tidak terlalu signifikan sehingga jika nilai dana alokasi umum mengalami peningkatan tidak akan mempengaruhi nilai belanja modal secara signifikan begitu juga sebaliknya.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap rumusan masalah penelitian, dan rumusan masalah itu sendiri dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, 2015). Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka ditetapkanlah hipotesis dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:

- H1 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah kota Batam.
- H2 : Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah kota Batam.
- H3 : Pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah kota Batam.